

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia  
Volume 2, Nomor 3, Juni 2023, Halaman 159-166  
ISSN: 2986-7002  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8051441>

## Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

Muthi Janatun<sup>1</sup>, Ida Rosiana<sup>2</sup>, Riva Kansa Reza<sup>3</sup>, Ivan Darmawan<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran

email: [muthi20001@mail.unpad.ac.id](mailto:muthi20001@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>, [ida20002@mail.unpad.ac.id](mailto:ida20002@mail.unpad.ac.id)<sup>2</sup>,  
[riva20001@mail.unpad.ac.id](mailto:riva20001@mail.unpad.ac.id)<sup>3</sup>, [ivan.idevice@gmail.com](mailto:ivan.idevice@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi evaluasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kota Bandung. Tujuan dari jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah untuk memahami secara utuh fenomena yang dialami subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung telah dievaluasi, namun belum maksimal karena masih adanya masalah yang berkaitan dengan kriteria evaluasi seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan kesesuaian. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, namun Pemerintah belum dapat memecahkan masalah dikarenakan masih terdapat TPS yang melebihi kapasitas sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar TPS.

**Kata Kunci:** *Kebijakan, Evaluasi, Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Kesesuaian.*

### Abstract

The purpose of this study is to determine and evaluate the evaluation of the Department of Environment and Hygiene (DLHK) on the implementation of the Bandung City waste management policy. The purpose of this type of descriptive research with a qualitative approach is to fully understand the phenomena experienced by the research subject by means of a description in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various scientific methods. The results showed that the waste management policy in Bandung City has been evaluated, but not maximized because there are still problems related to evaluation criteria such as effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and suitability. Bandung City Regional Regulation Number 9 of 2018 concerning Waste Management, but the Government has not been able to solve the problem because there are still TPS that exceed the capacity so that it disturbs the comfort of the community around the TPS.

**Keywords:** *Policy, Evaluation, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Conformity.*

## PENDAHULUAN

Bagi kota besar sampah merupakan permasalahan yang tidak kunjung usai sehingga membutuhkan penanganan pengelolaan yang profesional dalam penyelesaiannya. Dengan adanya pengelolaan sampah yang baik dan profesional permasalahan sampah dapat terselesaikan sehingga dapat menciptakan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat. Namun, apabila pengelolaan sampah tidak dapat berjalan dengan baik hal tersebut akan memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat seperti, lingkungan yang kotor, penyakit, polusi, dan lain-lain.

Adanya perkembangan demografi yang pesat menjadi salah satu alasan adanya peningkatan jumlah sampah di kota-kota besar. Akan tetapi peningkatan jumlah sampah ini tidak diikuti dengan pengelolaan serta sarana dan prasarana yang baik sehingga mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dalam sistem pengelolaan sampah yang kompleks.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada 2022 Indonesia telah menghasilkan sampah sebanyak 19,45 juta ton. Berdasarkan data tersebut, sampah sisa makanan mendominasi jumlah sampah sebesar 41,55% yang diikuti dengan sampah plastik sebanyak 18,55%. Selain itu sampah tersebut juga didominasi oleh kayu/ranting (13,27%), kertas/karton (11,04%), logam (2,86%), kain (2,54%), kaca (1,96%), karet/kulit (1,68%), dan sampah jenis lainnya (6,55%).

Berdasarkan sumbernya mayoritas sampah dihasilkan oleh timbunan sampah rumah tangga dengan proporsi sebesar 39,63%. Kemudian diikuti oleh sampah yang bersumber dari perniagaan sebanyak 21,07%, 16,08% dari pasar, 7,14% dari kawasan komersial/industri/kawasan lainnya, 6,82% dari fasilitas publik, 5,96% dari perkantoran, dan 3,3% dari sumber-sumber lainnya.

Pada akhirnya permasalahan pengelolaan sampah sampai saat ini masih terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Pertumbuhan jumlah timbunan sampah tentunya diiringi oleh adanya pertumbuhan penduduk. Apabila pertumbuhan penduduk semakin pesat maka laju pertumbuhan sampah akan meningkat secara alami. Pada kota-kota besar pertumbuhan penduduk merupakan salah satu permasalahan terutama apabila melihat dari timbunan sampah yang mempengaruhi berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, permasalahan sampah menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai bagi pemerintah pusat maupun daerah sehingga pemerintah dituntut untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang sudah menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

Maka dari itu, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan permasalahan ini dan menganggarkan secara khusus untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah. Selain itu pengelolaan sampah juga memiliki kaitan yang erat dengan kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah. Adanya peraturan yang ketat dan ketegasan dari sikap pemerintah melalui berbagai regulasi juga tidak selalu berhasil dalam menangani permasalahan sampah yang kompleks. Hal tersebut dikarenakan penerapan regulasi yang tidak tegas sehingga masih banyak masyarakat yang tidak taat akan regulasi tersebut dan masih membuang sampah sembarangan sehingga hal tersebut mempengaruhi nilai estetika suatu wilayah karena adanya sampah yang tidak pada tempatnya dan juga bau tidak sedap yang muncul dari sampah-sampah tersebut.

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang terdapat di Indonesia yang tidak luput dari adanya permasalahan pengelolaan sampah. Sampai pada saat ini terdapat 30 TPS yang dinyatakan kelebihan kapasitas. Hal tersebut tentunya mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar TPS. Hal ini terjadi karena terdapat kendala pada TPA Sarimukti karena kurangnya alat berat yang digunakan untuk mengangkut sampah sehingga menghambat penyeteroran sampah ke TPA Sarimukti dan sampah mulai menggunung di beberapa TPS. Akan tetapi, hal tersebut bukan satu-satunya faktor penyebab terjadinya *overcapacity*. Berdasarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dudy Prayudi, dengan adanya keterbatasan lahan maka TPS di kota Bandung masih kurang sehingga belum bisa memadai jumlah volume sampah di kota Bandung.

Selain itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah kota Bandung juga telah mengeluarkan regulasi mengenai pengelolaan sampah melalui Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Akan tetapi, melihat keadaan kota Bandung pada saat ini sepertinya masih

belum berjalan secara maksimal sehingga masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan sampah kota Bandung. Maka dari itu, perlu dilakukan evaluasi implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di kota Bandung.

Menurut William Dunn (2003), Evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan untuk memberikan penilaian pada kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan. Dengan begitu, berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa kriteria dalam melaksanakan evaluasi kebijakan publik, yaitu :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan (*Adequacy*)
4. Pemerataan (*Equity*)
5. Responsivitas (*Responsiveness*)
6. Ketepatangunaan (*Appropriateness*)

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong, (2007: 6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian berfokus untuk meneliti pengelolaan sampah di Kota Bandung. Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan review jurnal yang dapat diperoleh dengan online. Peneliti memilih pendekatan kualitatif dikarenakan dapat membantu peneliti untuk menghimpun data, misal dalam permasalahan yang benar-benar terjadi di lapangan dan menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Supaya pembahasan lebih terstruktur, peneliti memerlukan definisi konsep dalam teori yang digunakan supaya memudahkan untuk mengenali lebih dalam mengenai dari definisi konsep tersebut. Konsep yang digunakan adalah :

- 1) Efektifitas. Menurut Dunn, Efektivitas (*effectiveness*), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai moneterinya (Dunn, 2003). Artinya, efektivitas dalam proses evaluasi kebijakan publik berkaitan dengan apakah suatu kebijakan (alternatif) dapat mencapai hasil yang diharapkan dalam mencapai tujuan suatu tindakan. Dalam hal ini yang menjadi parameternya adalah apakah sampah dapat sampai di TPA pada tepat waktu.
- 2) Efisiensi. Menurut William N Dunn efisiensi diartikan sebagai jumlah usaha yang dikeluarkan untuk mencapai suatu tujuan. Efisiensi memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas saat mencapai tujuan suatu usaha. Dalam hal ini efisiensi diukur dengan apakah retribusi sampah yang dibayarkan sebanding dengan kebersihan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat.
- 3) Adequacy/kecukupan. Menurut Dunn, kecukupan mengacu pada seberapa baik kebijakan yang telah ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan yang relevan. Dengan kata lain, kebijakan yang telah ditetapkan dapat memenuhi unsur kriteria kecukupan jika berhasil menyelesaikan masalah yang ingin diatasi oleh kebijakan tersebut. Kecukupan dapat dilihat dari beberapa hal berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Dunn (2003:430), sejauh mana tingkat efektivitas memenuhi nilai, kebutuhan, dan kesempatan dalam menghadapi

kesulitan yang meluas merupakan ukuran kecukupan. Syaratnya adalah tidak ada sampah di lokasi TPS.

- 4) *Equity* / pemerataan. Suatu kebijakan harus dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih merata dalam masyarakat agar dapat dikatakan berkeadilan. Dengan kata lain, kriteria pemerataan berusaha untuk menunjukkan bahwa setiap tujuan kebijakan yang direncanakan telah mendapatkan distribusi yang merata dari kebijakan yang telah diberlakukan. sehingga tujuan kebijakan sudah tepat berdasarkan pemerataan keadilan yang telah diberikan oleh para pembuat kebijakan terhadap tujuan-tujuan kebijakan. Indikatornya adalah tidak adanya kekhawatiran dan perilaku protes dari masyarakat.
- 5) *Responsiveness*. Responsivitas kebijakan publik dapat dilihat sebagai reaksi terhadap suatu tindakan. Ini mengacu pada bagaimana penerima manfaat yang dituju kebijakan bereaksi ketika dipraktikkan. Sejauh mana suatu kebijakan dapat memuaskan keinginan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok orang tertentu, menurut William N. Dunn, disebut sebagai responsif (Dunn, 2003: 437). Keberhasilan suatu kebijakan dapat ditentukan oleh bagaimana masyarakat bereaksi terhadap implementasinya setelah membuat prediksi tentang konsekuensi dari implementasinya, serta oleh bagaimana masyarakat bereaksi setelah efek kebijakan mulai dirasakan, apakah dengan cara positif seperti dukungan atau cara negatif seperti penolakan. Kriteria responsivitas, menurut Dunn, sangat penting karena "bahkan jika suatu analisis memenuhi semua kriteria lain — efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan — itu masih gagal jika belum memenuhi kebutuhan populasi target" (Dunn, 2003: 437). Oleh karena itu, dibandingkan dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan, kriteria responsivitas mewakili persyaratan, preferensi, dan nilai aktual dari beberapa kelompok. Parameternya yakni terdapatnya media yang dapat digunakan untuk melaporkan mengenai keluhan.
- 6) *Appropriateness/ketepatangunaan*. Keakuratan tujuan program dan keandalan anggapan yang mendukungnya keduanya dirujuk. Menurut William N. Dunn, kriteria kelayakan digunakan untuk memilih sekelompok alternatif untuk rekomendasi dengan menentukan apakah hasil dari alternatif adalah pilihan tujuan yang bisa diterapkan. Karena kriteria kelayakan berfokus pada substansi tujuan daripada metode atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, itu terkait dengan rasionalitas substantif (Dunn, 2003: 499). Ini berarti bahwa indikator keberhasilan kebijakan tambahan (jika ada) dapat menutupi kesenjangan akurasi. Misalnya, efek tambahan yang sulit diantisipasi sebelumnya, baik efek kejut baik maupun negatif, atau pengganti potensial lainnya yang lebih terasa dari eksekusi kebijakan, sehingga memungkinkan pergerakan kebijakan yang lebih dinamis. Parameternya yakni mengenai pengelolaan sampah di Kota Bandung dapat dikelola dan diatur dengan baik. Wiliam Dunn (2003)

Dalam penelitian ini, data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari publikasi seperti buku, majalah, internet, dan jurnal yang berhubungan dengan materi pokok penelitian. Teknik yang digunakan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Untuk mendukung dan memperkuat kepercayaan dan bukti suatu peristiwa, dokumen dan data diperlukan pada permasalahan yang ada sehingga dapat diteliti lebih dalam dan kemudian memeriksa hasilnya secara menyeluruh. Dalam situasi ini, peneliti mencari data dengan melihat berbagai literatur atau dokumen lainnya yang dianggap berkaitan dengan subjek penelitian.

Dalam penelitian pada akhirnya ingin mendapatkan data Basrowi dan Suwanti (2008:1-2) yang menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang memiliki tujuan dalam memperoleh pemahaman mengenai kenyataan melewati proses berpikir

induktif. Berdasarkan pada jenis penelitian kualitatif sehingga berkaitan dengan instrumen penelitian ini yang mana peneliti memiliki hak untuk menentukan keberhasilan dari penelitian ini. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa:

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.” (Sugiyono, 2019:320)

Penelitian kualitatif merupakan analisis data induktif yang mana awalnya bersifat khusus sehingga ditarik menjadi proposisi yang bisa digeneralisasikan dengan luas. Analisis data kualitatif dilaksanakan dengan beriringan pada proses pengumpulan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pemerintahan terdapat 3 aspek, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Sebagai pelayan publik dan aktor pemberdayaan serta pembangunan tentunya pemerintah dihadapkan oleh berbagai permasalahan. Maka dari itu sebagai upaya dalam penyelesaian permasalahan tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai produk-produk hukum seperti kebijakan publik dan mengadakan berbagai pembangunan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut tidak selalu dapat menyelesaikan masalah. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi agar kebijakan tersebut dapat diperbaiki.

Dalam hal ini untuk menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah pemerintah kota Bandung telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Akan tetapi, kebijakan tersebut masih belum bisa mengatasi permasalahan pengelolaan sampah di kota Bandung. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi pada kebijakan pengelolaan sampah pemerintah kota Bandung. Pada dasarnya evaluasi pengelolaan sampah memiliki tujuan agar kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola sampah dapat meningkat sehingga permasalahan sampah di kota Bandung dapat terselesaikan.

Adanya tuntutan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah serta demi mencapai terciptanya kebersihan lingkungan melalui kebijakan pengelolaan sampah kota Bandung, evaluasi kebijakan ini dilakukan dengan melakukan analisis berdasarkan aspek efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), perataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*).

### 1) Efektifitas

Pada siklus kebijakan evaluasi merupakan salah satu proses yang penting setelah kebijakan tersebut berlaku. Evaluasi bertujuan untuk menilai hasil dari implementasi suatu kebijakan. Tentunya, untuk menilai hasil implementasi perlu dilakukan analisis mengenai tingkat keberhasilan implementasi, kegagalan dalam implementasi, efektivitas, dan efisiensi. Dalam kajian ilmiah efektivitas merupakan bagaimana tujuan pada kebijakan telah tercapai dengan maksimal menggunakan cara, sumber daya, dan alat yang ada.

### 2) Efisiensi

Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan melalui cara, besarnya sumber daya, dan alat yang digunakan. Artinya, efisiensi mengukur bagaimana suatu kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan tujuan dari adanya suatu kebijakan dengan hasil yang optimal namun dengan tidak banyak membuang sumber daya dan waktu dalam implementasinya. Dengan begitu, implementasi pada suatu

kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila suatu tujuan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan usaha yang sudah ditentukan pula. Penilaian efisiensi dibutuhkan untuk mengukur seberapa banyak usaha yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan pada implementasi kebijakan. Maka dari itu, untuk mengukur efisiensi tersebut dapat dilihat dari bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandung.

- 3) *Adequacy/kecukupan*  
Kriteria kecukupan mengkaji seberapa baik kebijakan yang telah ditetapkan dapat mengatasi masalah atau menyelesaikan krisis. Kriteria kecukupan memberikan penekanan khusus pada seberapa kuat alternatif kebijakan berhubungan dengan hasil yang diantisipasi. Penelitian ini memberikan penekanan khusus pada seberapa akurat masalah yang diselesaikan selama implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No. 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- 4) *Equity / pemerataan*  
Pemerataan berkaitan dengan pendistribusian terhadap pengelolaan sampah seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kebijakan yang tersebar secara adil adalah kebijakan yang berorientasi pada pemerataan. Kebijakan yang dibuat untuk mendistribusikan sesuai dengan standar kemiripan. Gagasan keadilan atau kewajiban yang saling bersaing sangat terkait dengan kriteria kemiripan. PERWALI Kota Bandung No. 1426 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga [JDIH BPK RI] Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1426 Tahun 2018 Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 5) *Responsiveness*. Seberapa baik suatu kebijakan dapat mengakomodasi persyaratan, selera, atau nilai-nilai kelompok yang berbeda disebut sebagai responsif. Kriteria responsivitas sangat penting karena bahkan jika analisis memenuhi persyaratan efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan, itu masih akan gagal jika tidak memenuhi kebutuhan kelompok yang benar-benar akan mendapat manfaat dari keberadaan kebijakan. Untuk memenuhi tuntutan pelaksana dan tujuan, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah sedang dilaksanakan dalam penelitian ini dengan fokus memuaskan kebutuhan pelaksana dan dan sasaran.
- 6) *Appropriateness/ketepatangunaan*  
Ketepatan (*appropriateness*) kriteria ketepatan berkaitan dengan satu unit kriteria melainkan dua atau lebih kriteria yang digabungkan, kriteria kesesuaian secara substantif terkait erat dengan rasionalitas. Akurasi digunakan untuk menggambarkan biaya atau nilai tujuan program serta anggapan kuat yang mendukung tujuan tersebut. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, kebenaran penelitian ini menyoroti hasil yang ditargetkan (tujuan) yang benar-benar bermanfaat atau berharga.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa evaluasi kebijakan di Kota Bandung belum maksimal karena pengelolaan sampah masih menjadi isu utama yang perlu diselesaikan oleh pemerintah. Isu ini sampai menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Pada kriteria evaluasi efektivitas, memang adanya peraturan yang ketat dan tegas dari sikap pemerintah melalui berbagai regulasi, namun

tidak berhasil dikarenakan penerapan regulasi yang tidak tegas sehingga masih. Kemudian nyambung pada kriteria efisiensi, banyak masyarakat yang tidak taat akan regulasi tersebut dan masih membuang sampah sembarangan sehingga hal tersebut mempengaruhi nilai estetika suatu wilayah karena adanya sampah yang tidak pada tempatnya dan juga bau tidak sedap yang muncul dari sampah-sampah tersebut. Sementara itu, kriteria kecukupan juga belum dapat menyelesaikan masalah karena masih ada TPS yang melebihi kapasitas sehingga mengganggu ketenangan masyarakat di sekitar TPS. Walau pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, agar evaluasi pengelolaan sampah yang memiliki tujuan agar kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah dalam mengelola sampah dapat meningkat sehingga permasalahan sampah di kota Bandung dapat terselesaikan.

## SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk memperbaiki serta meningkatkan mengenai efektivitas untuk dapat mengelola sampah di TPS. Tidak hanya itu, DLHK juga memberikan ruang yang cukup untuk menampung sampah-sampah supaya tidak berserakan sehingga biaya yang sudah diberikan dapat digunakan dengan optimal. Di samping itu, tempat sampah juga tidak tersebar secara merata banyaknya, masih terdapat beberapa tempat yang masih sedikit terdapat tempat sampah. Kapasitas perencanaan dan pengembangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung perlu adanya peningkatan dalam menciptakan inovasi pada program kegiatan dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Perlu adanya kerja sama pada tingkat kecamatan juga supaya bisa membantu dalam memecahkan permasalahan sampah di tiap kecamatan. Terakhir, perlunya peningkatan pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang sudah ada.

## Referensi

- Anindyadevi Aurellia. (2023, May 11). *Persoalan Sampah yang Menjerat Kota Bandung*. Detikjabar; detikcom. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6715097/persoalan-sampah-yang-menjerat-kota-bandung>
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 09 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Portal Bandung. (2023). *Ubah Sistem Kelola, Pemkot Bandung Olah 300 Ton Sampah*. <https://www.bandung.go.id>. <https://www.bandung.go.id/news/read/7664/ubah-sistem-kelola-pemkot-bandung-olah-300-ton-sampah>
- Cindy Mutia Annur. (2023, March 13). *10 Provinsi Penghasil Sampah Terbanyak 2022, Jawa Tengah Teratas*. Katadata.co.id; Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/13/10-provinsi-penghasil-sampah-terbanyak-2022-jawa-tengah-teratas#:~:text=Berdasarkan%20jenisnya%2C%20mayoritas%20timbulan%20sampah,dengan%20proporsi%2018%2C55%25>.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rinerka Cipta.
- Muara Torang Hadomuan, R. W. (2022). Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Volume 13, Nomor 1*, 9.
- Rendy, M. (2015). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Kota Palu. *e-Jurnal Katalogis, Volume 3, Nomor 11*, 75.

Dunn, William N. 1994. *Public Personnel Management and public policy*. New York: Addison Wesley Longman.